

Ada Apa Di Balik Pengandaian *Anda Rektor Universitas Pendidikan Indonesia?*

Oleh: JOHAR PERMANA

Tulisan saudara Iik pada harian ini terbitan Rabu 13 Oktober 2004 berjudul *Andai Saya Rektor Universitas Pendidikan Indonesia*, bukanlah konsumsi untuk memperoleh pelajaran bagaimana seorang rektor bisa memenej universitasnya dengan baik dan produktif. Tulisan itu nampaknya tidak bermaksud memberi masukan untuk seorang rektor atau calon rektor, lebih-lebih untuk calon rektor dari luar UPI yang berpeluang dan berkeinginan menjadi Rektor UPI misalnya untuk periode paling dekat 2004-2008. Bukankah di ujung tulisannya, penulis menegaskan kembali bahwa ia hanya *berandai* menjadi Rektor UPI (!).

Sebagai pengandaian, tentu saja tulisan itu bisa memaparkan apa saja! *Jadi segalanya mungkin (dibicarakan); hal yang tidak mungkin hanyalah kepala ditelan sendiri!* Di hadapan rekan aktivis mahasiswa sebagai audien (pembaca artikel dimaksud), saat itu (saat membaca), diminta penutur (penulis artikel) tidak boleh *marah* atau *mentertawakan* karena penuturannya (tulisannya) bisa jadi *sangat tidak ilmiah*. Mendorong respon pembaca yang dibatasi pada kombinasi pilihan kata jangan *marah* dan *tertawa* diringi dengan stimulus frasa *bisa tidak ilmiah* dari isi tulisannya, penulis artikel mencitrakan sosok diri pembaca (selain Rektor?) yang *interaktif* dengan pembicaraan soal UPI bisa mengalami rasa frustrasi. Saya melihat, sosok penulis yang kapasitasnya sebagai mantan aktivis mahasiswa IKIP Bandung, setidak-tidaknya mengalami ketidakpuasan akan almamaternya. Lalu, apakah benar Anda berandai menjadi Rektor UPI?

Saya ingin bertanya lebih jauh, mengapa beberapa permasalahan yang terjadi di UPI, dipaparkan penulisnya terkesan ringan, menarik dan lucu? Misalnya bagaimana seorang rektor harus memulai tugasnya untuk memantau sumberdaya yang dimiliki UPI dengan memerintahkan dekan untuk telaten memeriksa kondisi keran air yang telah banyak bocor! Seni mengubah diri gaya Aa Gym mulai dari hal-hal terkecil sih oke. Tetapi strategi membangun UPI BHMN dengan menugaskan Dekan memeriksa keran air secara telaten tidaklah proporsional. Masih ada Pembantu Dekan II, bahkan ada petugas khusus untuk itu, sebab tentu ada tugas lain yang lebih penting yang harus dilakukan seorang dekan! Adik saya yang keluaran UPI di daerah jadi bertanya, apa benar kran-kran yang ada di UPI telah boocor? Kata saya, lihat saja WC-WC-nya di sana?

Sisi tulisan lainnya memperlihatkan, bagaimana rektor mengemban tugas kedua. Ia harus menggunakan kata *membongkar* untuk menertibkan perumahan di kampusnya, bahkan memerlukan *tangan besi* untuk menyelesaikannya. Orang akan bertanya, ada apa dengan orang-orang di dalam kampus ini? Selain itu, contoh lainnya adalah untuk menghidupkan forum ilmiah, apa pentingnya penulis artikel perlu mengundang tokoh kontroversial seperti George Bush atau Abubakar Ba'asyir? Apakah gebyar kehidupan ilmiah selama ini, terutama menjelang ulang tahunnya yang ke-50 pada lembaga UPI telah demikian kering, sehingga memerlukan serum kaliber dunia?

Bagi para pembaca yang cermat, fenomena yang dipaparkan penulis artikel itu menyiratkan adanya permasalahan mendasar dihadapi UPI saat ini. Oleh karena itu, tulisan saudara Iik bagi saya, bukan ekspresi basa-basi, melainkan suatu keberanian memperkenalkan *dapur* UPI untuk mulai *ditengok* siapapun secara publik. Tidakkah mustahil sebagai suatu *pengandaian*, tokoh intelektual Bom Marriot sekalipun, bisa diundang untuk suatu greget bahwa forum ilmiah diharapkan *meledak* di kampus UPI? Nalar kita tidak harus sampai pada suatu analisis bagaimana UPI dihadapan para teroris. Tapi, senior saya diam-diam nyeletuk, pernah ada ancaman bom ke UPI ini. Sekali lagi ini serius, saya bertanya bukan berandai-andai: Ada apa dibalik pengandaian *Anda Rektor UPI*?

Saya berharap *pengandaian Anda Rektor UPI* tidak ditafsirkan orang secara ngelantur dan berlebihan. Untuk itu, tulisan ini mencoba menanggapi bukan sekedar atas posisi *Andai Anda Rektor UPI* tapi mempertanyakan jati diri UPI, pentingnya transformasi kultural dan sedikit wacana kemitraan dalam jaringan bisnis mengingat status UPI BHMN untuk masa yang akan datang.

Pertama-tama, sebaiknya *Andai Anda Rektor UPI* membuka kembali wacana historis, menggali alasan-alasan dan pemikiran yang komparatif dan menyegarkan, sekaligus memposisikan lembaga pendidikan guru tingkat universitas ini benar-benar memiliki *supremasi* dan kebanggaan di mata masyarakat/bangsa. Pikirkan baik-baik secara mendalam: substansi apa sebenarnya yang membentuk *karakter* (jati diri) UPI ini. Suatu karakter atau jati diri tidaklah boleh bahkan sebenarnya tidak akan pernah hilang terkikis oleh perjalanan panjang sejarahnya. Sebait sajak Mr. Muhammad Yamin yang Anda kutip, tidak cukup sekedar asesoris untuk sebuah pembuka tulisan di masmedia, lalu tidak dikupas sama sekali. Isi sajak itu justeru mengandung makna mendalam dan menurut saya sangat visioner (*fight the future*). Sebagaimana Anda kutip penggalannya, antara lain ... *Wahai pemuda harapan bangsa; Menuntut ilmu rajinlah senantiasa; Agar nanti menyulahi masa.*

Betapa isi sajak itu memperlihatkan bahwa siapapun pemuda harapan bangsa yang statusnya menjadi mahasiswa LPTK/UPI memiliki motivasi untuk rajin menuntut ilmu; ilmu untuk menyulahi masa! Jika tidak demikian menurut kondisi UPI saat ini, mereka semestinya dibina atau *digeenjut* untuk selalu rajin membaca. Apa salahnya kita belajar pada lembaga pendidikan setingkat pendidikan menengah secara formal. Saya teringat tulisan yang hurufnya besar-besar terpampang pada muka atas mesjid di lembaga itu sehingga mudah dibaca oleh para santrinya setiap kali mereka akan shalat: **Ke Gontor Apa Yang Kau Cari ?** Tulisan itu bukan hanya satu-satunya di sana; di berbagai sudut dalam kampus, dalam dokumen lain, selebaran, pembicaraan para ustadznya, dapat anda temukan. Jadi, menuntut ilmu itu harus kuat dan ilmu yang dituntut adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang juga *grounded*, ilmu yang membawa pencerahan untuk bangsa ini.

Kalau *Anda Rektor UPI* sempat pelajari, *Wasiat, Pesan, Nasehat & Harapan* Pendiri PM Gontor itu, mungkin bulu kuduk Anda bereaksi berkali-kali atas kebenaran yang diperlihatkan kepada Anda. Secuil dari dokumen itu: *Cintailah ilmu lillahita'ala, bukan karena gaji dan lainnya. Kalau kamu cinta kepada ilmu, maka ilmu yang wajib dicintai itu akan menemani kamu seumur hidupmu, di manapun kamu berada.* Artinya, ilmu yang ditekuni mahasiswa UPI tidak sekali-kali diperuntukan mendapat nilai, lalu

menyelesaikan S.1 dan bekerja sebagai guru ala kadarnya. Atau ilmu para dosennya asal-asalan memenuhi syarat S.2 dan S.3, lalu mendapat kesulitan dalam memperoleh pangkat guru besar (profesor) sebagaimana Anda komentari! Sebagai seseorang yang sedang menekuni studi di PPS UPI, dan kondisi Anda galau menjelang Wisuda Periode Oktober 2004 UPI ini, reaksi komparasi Anda bisa meneteskan air mata: betapa dokumen itu sarat dengan kebenaran dan pesan moral! Dokumen ini tradisinya dibacakan setiap waktu menjelang kegiatan wisuda para santrinya.

Kita tahu kondisi bangsa ini mengalami krisis berat dan berkepanjangan. Di era Otda sekarang ini, praktek korupsi merebak di berbagai lapisan; tindak kekerasan, perkosaan bahkan pembunuhan terjadi di mana-mana; manusia *makan* manusia; biadab memang! Singkat kata Bumi Indonesia, pertwi ini, berwajah sendu, menagis dan pilu. Fenomena krisis semua itu bagi saya erat hubungannya dengan tingkat keterdidikan bangsa ini dan keterdidikan bangsa bertumpu pada praktek pendidikan. Tentu saja sebagai *rektor UPI*, Anda harusnya merasa miris, geram dan kemudian bangkit membulatkan tekad serta merta memprakarsai untuk menjunjung kembali nilai-nilai luhur dan moralitas bangsa yang telah tercabik-cabik, terdistorsi dan jauh teralenasikan dari peradaban sehari-hari. Inilah kognisi baru bahwa UPI sebagai universitas yang mengemban misi utamanya mencetak tenaga kependidikan dan atau guru, supremasinya adalah menjunjung tinggi moralitas bangsa!

Selanjutnya, meski struktur kelembagaannya telah berubah sejak PTPG, FKIP Unpad, IKIP Bandung, UPI, dan kini UPI BHMN; apa salahnya *misi moralitas* dari *peran sebagai guru atau pendidik* berlaku untuk siapa saja lulusan UPI ke depan. Artinya sekalipun kelak dengan *wider mandate* lulusannya adalah sarjana-sarjana *non-kependidikan*; sebut saja dokter, insinyur, politikus, pengusaha, psikolog, dll; *bingkainya* adalah *moralitas* dari *peran guru* atau *pendidik*. Ini adalah *imperatif* baru atas pemaknaan dari suatu nama *universitas pendidikan* yang sering dilecehkan orang: UPI sebagai Universitas *Patilasan* (bekas) IKIP atau Universitas *Padahal Institut*. Dari pemikiran ini dapat saya tunjukkan *kongkritnya pengandaian* itu: dokter lulusan UPI akan lain dengan dokter lulusan perguruan tinggi bukan UPI. Sebut saja *dokter lulusan UPI* akan mengedepankan keterdidikan dalam prakteknya, sedang dokter lulusan universitas lain mengedepankan eksperimentasi. Menyadari sepenuhnya kondisi bangsa dalam keadaan krisis, politikus *lulusan UPI* sekalipun menyangkut dirinya, akan bertindak untuk menurunkan besarnya gaji Ketua MPR/DPR dan anggota legislatif lainnya, sedang politikus lulusan perguruan tinggi lain akan mempertahankan gaji itu bahkan menaikkan dan menambahnya dengan insentif-insentif lain. Dan seterusnya, pada saat lulusan UPI terpaksa jadi sopir Ledeng-Cicaheum, ia tetap akan membedakannya dari sopir-sopir trayek itu yang menganggap penumpangnya laksana barang atau *peda*!

Kiranya jelas, jati diri UPI ini adalah *moralitas keterdidikan dari peran seorang guru* atau *pendidik*! Kiyai Jawa Timur saat mewisuda para santrinya di tahun 2003 itu mengatakan: “kamu ini di manapun *ng-guruu lho*, apa kamu itu politikus, pengusaha, petani, pedagang atau yang lainnya; *ya ... tugasnya mengajari umat!*” Lalu, mengapa lembaga UPI merasa ... *kehilangan karakternya dalam mempersiapkan calon guru dan tenaga kependidikan lainnya* sebagaimana Anda nyatakan dalam artikel itu. UPI yang justeru misi utama lulusannya untuk menjadi guru atau pendidik/tenaga kependidikan, moralitasnya malahan dipertanyakan? Dengan jati diri semacam itu, apakah nanti lulusan

UPI mau ngajar, *oversupply*, atau banyaknya pesaing dari lembaga pendidikan tenaga guru/kependidikan lainnya, bahkan *sekedar dapat jodoh* sekalipun, tidak menjadi persoalan mendasar.

Saya sempat berdiskusi dengan sejawat mengenai supremasi apa untuk UPI ini? Mencuatlah pernyataan, andai bukan *moralitas keterdidikan* dari *peran seorang guru* atau *pendidik*, moralitas yang mana dan apa jadinya kiprah UPI nanti? Mengapa karya orang-orang UPI saat ini belum dapat diunggulkan? Kawan saya bilang, *karya-karya itu parsial, sesaat, bermotif duit dan tidak merefleksikan moralitas yang kuat*. Hasil risetnyapun, seperti Anda mencatat, *hanya ditumpuk menjadi arsip tanpa bisa dijual atau dimanfaatkan oleh umat* (?) Sama halnya dengan dharma penelitian, dharma pengabdian dan pengajaran yang berlangsung di UPI ini, karena dasar moralitas itu tidak mencukupi, hasilnyapun belum menjadi produk unggulan. Tidak salah kawan-kawan melakukan *browsing* ide-ide baru di internet. Kemudian ide-ide baru itu dipakai untuk *menscan* kondisi masyarakat kita sehingga ditemukan sejumlah permasalahan. Dari situ lahirlah sejumlah proposal untuk proyek-proyek pembangunan pendidikan di negara kita (?) Tetapi kalau cara liberal ini dibiarkan dan tidak dibarengi *istiqomah* dalam penerapan ide-ide baru itu, lebih-lebih tidak didasarkan atas moralitas yang luhur, sistem pendidikan kita akan selalu compang-camping, *borontok* bahkan ujung-ujungnya menyisakan utang negara yang semakin besar.

Metode IQRO atau MQ (Manajemen Qolbu) itu bukan hasil pakar pendidikan atau profesor dari UPI. Bahkan gagasan-gagasan kontemporer seperti Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), Kurikulum Berbasis Kompetensi, dan lainnya yang diterapkan dalam dunia pendidikan akhir-akhir ini bukanlah karya otentik yang ditemukan orang-orang UPI. MBS mengalami plesetan menjadi **Mahal Biaya Sekolah** atau dari aslinya *School Based management* –SBM, diartikan *Sakola Beuki Mahal*? Maaf kawan saya itu bilang lebih lanjut bahwa profesor-profesor kita meskipun kondisi masyarakat kita dalam keadaan krisis, masih saja nyenyak tidurnya. Para konsultan dari UPI yang sekarang ini cukup marak di luar mestinya dikumpulkan dan diberi pengarahan dulu. Soalnya, kata kawan saya itu, tidak ada kegelisahan atau moralitas yang kuat dalam diri mereka, selain kegelisahan finansial (?) Lalu, apa salahnya, andai *Anda Rektor UPI* membuka *pusat studi tentang moralitas bangsa dan anti korupsi* untuk mendorong lahirnya lembaga-lembaga penjamin moralitas bangsa. *Lain ieu mah jurusan filsafat nu aya malah disuruh bubar*, ia nyeletuk!

Selain itu, dalam mempelajari perubahan kelembagaan sejak PTPG 1954 menjadi FKIP Unpad 1957, IKIP Bandung 1963, UPI 1999, hingga terakhir UPI BHMN 2004, tidak cukup sekedar menunjukkan perubahan nama dan mengangkat isu ringan seperti *konversi* laksana *oray kadut* yang hanya *berganti kulit*. Atau, binatang *bunglon* untuk sekedar taktis politis dalam beradaptasi pada lingkungan strategik dengan motivasi asal selamat dan dapat duit. Perubahan dalam waktu yang merentang 50 tahunan itu sewajarnya mengangkat isu signifikan pertanda adanya misi transformasi, sehingga arti reformasi bagi UPI bukan sekedar tataran struktural dan instrumental, tetapi yang pokok adalah kultural.

Bicara perubahan kultural memang amat tergantung pada siapa diri-diri yang berperan dalam lembaga UPI ini. Tetapi *Andai Anda Rektor UPI* tentu perannya menjadi demikian dominan, karenanya harap Anda betul-betul tahu, memahami dan menghargai

bahwa para penghuni kampus ini (termasuk Anda sendiri) memiliki karsa dan kemerdekaan untuk berekspresi. Mereka, ya ... kita ini memiliki potensi untuk berpikir, mengkaji dan mengembangkan nilai-nilai luhur, filosofi bahkan ideologi; memmanifestasikan konsep-konsep kelimuan; berperilaku sebagai teladan; dan berkarya menata lingkungan dengan cara yang paling baik. Substansi perubahan kultural ini semestinya dipegang teguh, sehingga perubahan nama apapun dengan presidennya siapapun, tidak akan mengganggu pertumbuhan jati diri UPI.

Jangan disebut-sebut Anda bisa *bertangan besi* dalam menyelesaikan masalah perumahan di dalam kampus ini, sebab ini semacam ancaman. Siapa saja, yang nakal, yang keras kepala, yang setia, yang menggugung, yang suka memfitnah, yang menjilat, yang santun, yang khianat, yang berdedikasi, yang menyimpang, yang egois, yang otoriter, yang serem, yang baik, yang selalu berseri-seri, yang kasar, yang halus bertutur, ... dan seterusnya; sekali lagi memiliki perasaan, kebutuhan dan potensi dalam menyelesaikan masalah. Lebih baik berkomunikasi secara terbuka, penuh pengayoman dan kekeluargaan, toh semuanya saudara di rumah sendiri.

Pemahaman di atas mengandung implikasi yang amat luas dan rinci, tidak cukup untuk sekedar menanggapi tulisan *Anda* di sini. Yang jelas, rentang waktu yang panjang ke depan, tidak perlu dibuat kelompok-kelompok yang mengesankan praktek-praktek kolusi dan diskriminasi bisa terjadi dalam kebijakan kepemimpinan *Andai Anda Rektor UPI*. Pembinaan untuk perubahan kultural ini hanyalah acak dan spontan: kampus yang religius di Bulan Ramadhan sepatutnya disertai kebijakan *Anda, Andai Rektor UPI*, lebih semarak sehingga warga kampus yang muslim bisa beritikaf dalam 10 hari terakhir dan tidak perlu ada perkuliahan seperti biasa; apa salahnya *Andai Anda Rektor UPI* mempesantrenkan dosen-dosen muda yang muslim ke DT, agar terbina kembali qolbu dan moralitas para dosennya.

Selain itu, kehendak beberapa dosen untuk membuka program dan gagasan-gagasan baru di UPI semestinya ditanggapi; iklim dan perilaku yang masih feodalistik dari senior-senior kampus didorong untuk diubah menjadi lebih demokratis dan egalitarian; praktek budaya kerja birokratik penting digeser menjadi berorientasi mutu; lalu ... apa salahnya UPI mengembangkan lembaga studi budaya ? Katanya PPS UPI tidak mengenal *Grand Theory*-nya ilmu-ilmu sosial, sehingga filsafat ilmunya terkesan sebatas pelajaran filsafat, tanpa makna yang mendalam.

Sisi lain yang terakhir, pada masa keterlanjuran, karena *didorong oleh keterpaksaan*, UPI berstatus BHMN, sebaiknya mengedepankan peran *Anda, Andai Rektor UPI*, sebagai *leaderpreneur*. Disamping mendorong dan membina secara internal kelembagaan UPI untuk semakin industrial, sosok rektor sebagai *leaderpreneur* tidak akan pernah kehilangan jati dirinya dan jati diri lembaga yang dipimpinnya. Sosok demikian sekaligus mengutamakan *Anda* berperan menggali dan memanfaatkan sumber-sumber daya organisasi untuk suatu pembinaan jaringan kemitraan bisnis dan finansial secara luas.

Lembaga yang didorong untuk semakin industrial dan jaringan kemitraan bisnis dan finansial itu semestinya dirintis secara khierarkis mulai dari tingkat pusat, kelembagaan fakultas, lembaga penelitian, lembaga pengabdian, hingga tingkat kelembagaan jurusan dan unit-unit lain yang dipandang cukup bisa mandiri. Tidak boleh

ragu dalam memberikan kepercayaan dan otonomi kepada semua pejabat di sana, agar kreativitas mereka bertambah-tambah.

Pemahaman atas lembaga atau unit organisasi internal UPI yang didorong untuk semakin industrial diartikan bahwa lembaga itu dengan kekuatannya sendiri atau melalui kemitraan sektor-sektor bisnis di luar kampus, membuka unit kerja atau industri tersendiri sebagai tempat praktek kerja mahasiswa sekaligus bersifat produktif dan menguntungkan secara finansial. *Andai Anda Rektor UPI*, mesti bisa membuka sektor yang berkaitan langsung dengan kiprah seorang guru. Apa salahnya misalnya UPI mendirikan lembaga-lembaga seperti *day care* atau *play group* (terutama untuk dosen-dosen dan karyawan UPI sendiri yang masih mempunyai anak kecil, di samping TK, SD, SMP atau SMU yang sekarang sebagian statusnya telah menjadi sekolah-sekolah laboratorium. Mahasiswa PGTK, PGSD atau mahasiswa dari jurusan-jurusan lain yang relevan, alumninya yang belum bekerja, beserta dosen dan pegawai (negeri?) lainnya bisa bersama-sama bekerja di sini.

Lalu, mempertimbangkan banyaknya mobil atau motor yang dimiliki warga UPI dan mahasiswa jurusan otomotif UPI tidak boleh ketinggalan zaman dalam praktek otomotifnya, bisa saja *Anda, Andai Rektor UPI* memfasilitasi staf dan dosen jurusan yang terkait untuk membuka sendiri atau menjalin kerja sama dengan perusahaan otomotif berupa satu bengkel otomotif. Apa salahnya di sini *Anda* belajar pada MAN Jember di Jawa Timur yang punya bengkel seperti itu. Alumni yang tidak melanjutkan sekolah dan belum bekerja secara mandiri di masyarakat, mereka ikut bekerja di bengkel ini dan produktif.

Lain halnya untuk Jurusan Administrasi Pendidikan tempat penulis bekerja. Di sini sebenarnya bisa dibentuk lembaga kerjasama jurusan dan alumninya untuk mengakses pekerjaan-pekerjaan di bidang administrasi dan manajemen pendidikan atau sistem persekolahan yang tak kurang banyaknya. Maaf, para konsultan sebaiknya tidak bekerja sendiri-sendiri tetapi mereka adalah pengorder yang pekerjaannya untuk sebagian dapat dikerjakan melalui lembaga ini. Manfaatnya, dosen muda terbina dan alumni bisa mengidentifikasi perilaku profesional para seniornya. Kita mesti yakin, jurusan-jurusan di UPI bisa membuka unit-unit industrial lainnya.

Andai Anda Rektor UPI, semestinya Anda memiliki keyakinan bahwa pimpinan-pimpinan fakultas, lembaga-lembaga dan jurusan-jurusan ini memiliki peluang untuk membuka sektor industri yang relevan dan produktif. Apakah salah untuk belajar ke DT atau PM Gontor. Kedua lembaga pendidikan ini, memiliki banyak unit usaha produktif yang pengoperasiannya dilakukan oleh kebanyakan para santrinya. Mereka menjadi melek bisnis dan sekali lagi tidak usah khawatir melihat mahasiswa Anda sendiri bekerja di sana. Bukan berarti mereka harus dan akan keluar dari kemungkinan profesi yang diembannya; sebut saja mengajar Bahasa Indonesia di sekolah. Terserah mereka sebenarnya, yang penting *moralitas* dari *peran guru* atau *pendidik* tetap hidup di sekeliling kesibukan mereka itu.

Sebenarnya ada ide yang cukup mendasar lainnya untuk *Anda, Andai Rektor UPI* yang harus mengambil kebijakan strategis di tingkat universitas. Anda harus bekerja dengan baik dengan Majelis Wali Amanah yang terbentuk untuk UPI berstatus BHMN ini. Pikirkan apa arti kurang lebih 4.000 mahasiswa UPI yang setiap tahunnya masuk

sebagai mahasiswa baru? Mereka tidak semata-mata statusnya sebatas sebagai mahasiswa UPI yang menyetor kurang lebih Rp 8 milyar setiap tahunnya. Mestinya mereka selain dipandang sebagai konsumen, juga sebagai nasabah bank yang dibentuk kepemilikannya oleh UPI sendiri, sekaligus yang lebih penting lagi mereka adalah statusnya sebagai penyimpan saham untuk unit-unit industri yang dibentuk sendiri atau perusahaan-perusahaan yang dijalin kemitra-bisnisannya dengan UPI. Ingat, jaringan bisnis itu tidak hanya secara nasional tetapi bisa dilakukan secara internasional dengan memperhatikan standar-standar bisnis yang berlaku, seperti halnya sertifikasi ISO 9002.

Masalahnya kebutuhan warga UPI amat banyak dan asetnyaapun besar. Kebutuhan yang bisa dikelola UPI berstatus BHMN ini, bisa berupa sembako, ATK, kendaraan, property, obat-obatan, produk-produk rumah tangga, barang elektronik, dan lain-lain. Bisa dibayangkan jika analisis kebutuhan ekonomi itu dilakukan secara komprehensif dan cermat berapa banyak perusahaan-perusahaan yang dijalin kemitra-bisnisannya dengan UPI ini, termasuk perusahaan asuransi. Kita jangan kalah dengan keuntungan finansial yang diperoleh perusahaan-perusahaan yang memasarkan produknya secara multi level. Mengapa tidak kita pelajari bahwa mahasiswa kita juga bisa *di-down line* masuk keanggotaan perusahaan mereka, sehingga kita bisa mengembangkan MOU untuk bagi keuntungan. Dengan pengembangan ide dasar seperti ini, tidak menutup kemungkinan mahasiswa memperoleh kemudahan-kemudahan dalam studinya, berupa bea siswa, penghematan dana praktikum, biaya penyelesaian studi dan bonus-bonus lainnya dari perusahaan.

Andai Anda Rektor UPI, sejak dini saya mendoa'kanmu. Semoga, demikian!

Penulis, Dosen Jurusan Administrasi Pendidikan FIP UPI.